



Uang Saku Transmigran Ditambah Jadi Rp13 Juta

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertans) akan memberangkatkan 4 Kepala Keluarga (KK) untuk mengikuti transmigrasi pada tahun 2025. Uang saku calon transmigran bakal ditambah dari Rp 10 juta menjadi Rp 13 juta per KK.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertans Erna Nur Setyaningsih mengatakan sebanyak 4 KK calon transmigran terdiri dari 12 jiwa. Daerah tujuan transmi-

grasi mereka adalah kawasan Torire Poso Sulawesi Tengah.

"Daerah tujuan transmigrasi itu yang menentukan dari kementerian. Rencana berangkat bersama seluruh transmigran dari DIY pada Desember," kata Erna, Rabu (1/10).

Dia menyebut, calon transmigran yang menunggu sekitar dua tahun ini diberangkatkan mengikuti program transmigrasi. Erna menyatakan latar belakang pendidikan calon transmigran tahun ini adalah lulusan SMA dan D3.

"Motivasi mereka mengikuti transmigrasi untuk memperbaiki

kesejahteraan dan tidak punya rumah," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta memberikan uang saku kepada para transmigran. Erna menyampaikan pada tahun ini uang saku yang diberikan sekitar Rp 13 juta/KK yang mengikuti transmigrasi. Nominal uang saku itu bertambah atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sekitar Rp 10 juta/KK. Penambahan nominal uang saku itu menyesuaikan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).

Dia menuturkan Dinsosnakertans Kota Yogyakarta juga mem-

bekali para transmigran dengan pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Termasuk dari Penda DIY dan dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain budidaya tanam padi dan tanaman perkebunan serta praktik pengolahan hasil pertanian.

"Kami juga lakukan pembinaan mental, motivasi dan kewirausahaan," tambahnya.

Diakuinya selama beberapa tahun ini calon transmigran yang berminat dari Kota Yogyakarta su-

dah ada daftar tunggu. Namun menurutnya kadang-kadang dari daerah tujuan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah pusat berbeda dengan harapan calon transmigran sehingga ada yang memilih menunggu daerah lain.

"Harapan kami masyarakat jangan memilih-milih (daerah tujuan transmigrasi). Kami tidak bisa menentukan lokasinya karena yang menentukan kementerian. Transmigrasi ini tidak hanya memindahkan (orang) tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (transmigran)," ucap Erna. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005